

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI

Yonda Agustian, Ardianto Arsan, Bukhari Mualim,
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

yondaagustian6@gmail.com

ardiantoarsan@gmail.com

bukharimualim@gmail.com

ABSTRAK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Dinas Inspektorat Kabupaten Kerinci. Data dalam penelitian ini adalah data Primer yang diperoleh langsung peneliti dari responden, adapun Sampel dalam penelitian ini adalah auditor-auditor yang ada di Inspektorat di pemerintahan Kabupaten Kerinci sejumlah 18 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Terdapat pengaruh antara Relevan, Netral Dan Dapat Dibandingkan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Di Pemerintahan Kabupaten Kerinci, tetapi Andal tidak terdapat pengaruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung pada Relevan, Netral dan Dapat Dibandingkan lebih besar dari ttabel, sedangkan di Andal thitung lebih kecil dari ttabel. Besarnya pengaruh Relevan, Andal, Netral dan Dapat di Bandingkan pada Dinas Inspektorat Kabupaten Kerinci terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 92 % sedangkan 8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Relevan, Andal, Netral dan Dapat Di Bandingkan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Menurut Tayib dalam Mardiasmo, laporan keuangan sektor publik merupakan kendaraan untuk menunjukkan akuntabilitas publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah maka selanjutnya disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Afrianti : 2011).

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai dikatakan oleh Suwardjono dalam Winidyanigrum *et al.* Lebih lanjut Xu *et al.*, dalam Sukmaningrum (2016) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan keuangan pemerintahan daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 32 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidak efektifan. Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Dikatakan oleh Simanjuntak (2015) bahwa perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode tersebut, *output* yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan

Hal ini dapat dicermati dengan melihat hasil pemeriksaan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan atas 5 LKPD tahun anggaran 2020 kepada enam Pemerintahan Daerah yang dilaporkan dalam Ikhtisar hasil yang dilaksanakan secara *daring* melalui vidio *cinferese* pada Jum'at tanggal 07-05-2021. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintahan Kab Kerinci. Dengan diberikannya opini tersebut oleh BPK, tidak serta merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan terbebas dari permasalahan karena BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan (Jambi.bpk.go.id).

Dengan adanya pemberian opini WTP pada pemerintahan kabupaten Kerinci mengisyaratkan bahwa baiknya kualitas laporan keuangan yang ada di Kabupaten Kerinci, hal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu di teliti apakah yang membuat kualitas laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Kerinci mendapat WTP secara berturut-turut tetapi masih belumdikatakan optimal hal tersebut sama dengan hasil penelitian Afrianti (2011) menyatakan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya masih memiliki pengendalian intern yang kurang memadai dan masih memerlukan perbaikan pengendalian intern.

Inspektorat daerah selaku auditor intern pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, seperti kehandalan auditor dalam mengaudit laporan keuangan, relevannya laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan secara netral dan laporan keuangan yang dapat di bandingkan, karena dari hasil yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum baik walaupun sudah mendapat WTP tetapi masih belum

optimal termasuk juga di Inspektorat Kabupaten Kerinci. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Dari hal di atas maka perlu diteliti apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada inspektorat Kabupaten Kerinci. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus relevan, andal, netral dan laporan keuangan dapat dibandingkan, Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam lingkup SKPD secara umum bukan hanya ditujukan kepada para *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan. Armando (2013) mengemukakan bahwa untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini diperlukan guna memberi gambaran hasil penelitian. Selanjutnya guna memperkuat adanya suatu korelasi variabel itu, maka memerlukan pembuktian analisa dilakukan terhadap jawaban hasil angket yang di sebar kepada responden. Teknik pengumpulan Data Primer dalam penelitian ini berupa Kuisisioner/angket yang disebarkan sebanyak 18 Pegawai Pada Kanto di Inspektorat Kabupaten Kerinci Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer dari penyebaran kuisisioner kepada Pegawai Dinas Inspektorat di pemerintahan Kabupaten Kerinci Data sekunder diperoleh dari mempelajari literature–literature serta laporan–laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2010:117) Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 44 Orang Pegawai di Dinas Inspektorat di pemerintahan Kabupaten Kerinci.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (sugiyono,2010:118). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total *sampling purposive*. *sampling purposive* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana sampel di ambil dilihat dari karakteristik-karakteristik tertentu, yang dimaksudkan dalam penelitian ini karakteristik tertentu sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah auditor-auditor yang ada di Inspektorat di pemerintahan Kabupaten Kerinci sejumlah 18 orang..

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Analisis Regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Dinas Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Riduan (2009:95) sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(3)$$

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil uji persamaan regresi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di inspektorat kabupaten kerinci.

1. Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Dinas Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci Konstanta Sebesar 1,872 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan nilai variabel andal, maka nilai kualitas laporan keuangan sebesar 1,872 %.

Koefisien andal terhadap kualitas laporan keuangan adalah negatif sebesar -026. Artinya semakin tinggi andal maka akan cenderung tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada inspektorat kabupaten kerinci yang di capai. Jika sistem pengendalian intern di naikan 1 satuan maka andal akan menurun sebesar 0,26 atau 26%.

2. Koefisien determinasi

Konstanta Sebesar 1,872 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan nilai variabel andal, maka nilai kualitas laporan keuangan sebesar 1,872 %. Koefisien andal terhadap kualitas laporan keuangan adalah negatif sebesar -026. Artinya semakin tinggi andal maka akan cenderung tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada inspektorat kabupaten kerinci yang di capai. Jika sistem pengendalian intern di naikan 1 satuan maka andal akan menurun sebesar 0,26 atau 26%.
untuk variabel kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci secara bersama-sama, maka dengan melihat R *Square* dapat diketahui besarnya pengaruh

relevan, andal, netral dan dapat di bandingkan terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 0,929 atau 92,9%. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variasi relevan, andal, netral dan dapat di bandingkan dapat menjelaskan variasi (pola pergerakan) nilai kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci sebesar 92,9%.

3. Uji t

Uji- t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh secara parsial antara kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Dinas Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan : $\alpha = 0,05$ atau 5 % untuk uji 2 (dua) arah dan $df = n - 2 - 1$. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan t- hitung dengan t- tabel.

Dengan taraf signifikan 5% dan 18 jumlah responden, dengan melakukan uji dua arah, maka diperoleh ttabel $df = n - k (18 - 5) = 13$ sehingga diperoleh ttabel = 2,160 dengan hasil sebagai berikut:

a. Relevan

Berdasarkan tabel 4.10. variabel relevan memiliki nilai thitung yakni sebesar 2,253, ttabel yakni sebesar 2,160. Jadi thitung $>$ ttabel yaitu ($2,253 > 2,160$) maka dapat disimpulakn bahwa secara persial relevan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

b. Andal

Berdasarkan tabel 4.10. variabel penyajian andal memiliki nilai thitung yakni sebesar -0,815 dengan ttabel yakni sebesar 2,160. Jadi thitung $<$ ttabel ($-0,815 < 2,160$) , maka dapat disimpulakn bahwa secara persial andal tidak pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan studi kasus pada Inspektorat Di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

c. Netral

Berdasarkan tabel 4.10. variabel netral memiliki nilai thitung yakni sebesar 9,610, ttabel yakni sebesar 2,160. Jadi thitung $>$ ttabel yaitu ($9,610 > 2,160$) maka dapat disimpulakn bahwa secara persial netral berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

d. Dapat Di Bandingkan

Berdasarkan tabel 4.10. variabel dapat di bandingkan memiliki nilai thitung yakni sebesar 3,291, ttabel yakni sebesar 2,160. Jadi thitung $>$ ttabel yaitu ($3,291 > 2,160$) maka dapat disimpulakn bahwa secara persial di bandingkan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

IV. PEMBAHASAN

Setelah didapatkan hasil penelitian dan dilakukan uji regresi linier sederhana, koefisien determinasi, uji t, maka selanjutnya peneliti mencoba memaparkan

pembahasan temuan hasil penelitian tersebut. Oleh yonda agustian gengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di inspektorat kabupaten kerinci pada tahun 2021, adapun hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

Berrdasarkan survei awal yang peneliti pelajari ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan pada Dinas Inspektorat Kab Kerinci sebagai berikut:Kaulitas laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Kerinci mendapat WTP secara berturut-turt dikatakan belum baik walaupun sudah mendapat WTP tetapi masih belum optimal.Kualitas laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Kerinci belum releva, andal, netral dan dapat di bandingkan.

1. Pengaruh karakteristik laporan keuangan (Relevan) terhadap kualitas laporan keuangan. Informasi yang relevan mempengaruhi kuaiitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Pengaruh karakteristik laporan keuangan (Dapat Dimengerti) terhadap kualitas Iaporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dimengerti mempengaruhi kualitas informasi. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
3. Pengaruh karakteristik laporan keuangan (Dapat Diuji) terhadap kuaiitas laporan keuangan. laporan yang dapat diuji oleh pihak auditor independen mempunyai peran besar terhadap kualitas laporan keuangan karena dengan opini yang diberikan oieh auditor, bisa memberikan gambaran terhadap laporan keuangan yang diuji.
4. Pengaruh karakteristik laporan keuangan (Netral) terhadap kualitas laporan keuangan. Informasi yang netral mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena infonnasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
5. Pengaruh karakteristik laporan keuangan (Dapat Dibandingkan) terhadap kualitas iaporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang berkaitan Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara Relevan, Netral Dan Dapat Dibandingkan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Di Pemerintahan Kabupaten Kerinci, tetapi Andal tidak terdapat pengaruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung pada Relevan, Netral Dan Dapat Dibandingkan lebih besar dari ttabel, sedangkan di Andal thitung lebih kecil dari ttabel.
2. Besarnya pengaruh Relevan, Andal, Netral dan Dapat di Bandingkan pada

Dinas Inspektorat Kabupaten Kerinci terhadap kualitas laporan keuangan sebesar sebesar 92 % sedangkan 8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Variabel yang paling dominan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan adalah Variabel Relevan, Netral dan Dapat di Bandingkan hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Armando Gerry, *Pengaruh Sistem Pendendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*, Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011*. Jakarta, Maret 2012. www.bpk.go.id

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntantansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal. 2008.

Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2016) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang”. Universitas Dian Nuswantoro.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet. IV, Yogyakarta: Andi, 2009.

Martono dan Agus Haijito. 2010. *Manajemen Keuangan (Edisi 3)*. Yogyakarta :Ekonesia.

Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.